BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan rangkaian kegiatan yang berjalan simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Renja Bakesbangpol tahun 2024 menjadi tahun ketiga pelaksaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026. Guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang mengarah pada peningkatan dan pemerataan kesejahteraan msyarakat, tahun 2024 diarahkan pada tema pembangunan "Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang berkualitas serta Tata Ruang yang Berkelanjutan serta Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan".

Proses penyusunan Renja Bakesbangpol tahun 2024 dimulai dengan persiapan penyusunan dengan mengumpulkan dan mengolah data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan perangkat daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja Bakesbangpol tahun 2023, serta mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026, Rencana Strategis Bakesbangpol (Renstra Bakesbangpol) Tahun 2021-2026, dan RKPD tahun 2024. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga mengakomodir pada penelaahan usulan kegiatan masyarakat dan pokok-pokok pikiran DPRD.

Dalam pelaksanaan Renja Bakesbangpol dimungkinkan adanya perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi: a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Proses penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan tahap perumusan rancangan dengan mengevaluasi kinerja tahun berjaan, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, hingga ditetapkan menjadi dokumen perubahan rencana kerja yang berpedoman pada perubahan RKPD.

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Blitar Tahun 2024 disusun dengan prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2021- 2026 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju;
2 Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2023 yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan / atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Bakesbangpol Kota Blitar dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Bakesbangpol Kota Blitar;

3 Memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi baik untuk tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025;
4 Penyusunan Renja PD bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD 2024, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

1.1.1 Keterkaitan antara Renja PD dengan RKPD

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan, penyusunan renja salah satunya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu pasal 78 ayat 1 huruf (d) Permendagri nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD mencakup penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Ini artinya antara Renja dan RKPD merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Renja berpedoman pada RKPD, sementara penyusunan Ranwal RKPD mencakup penelaahan terhadap Ranwal Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2024 berpedoman kepada RKPD Kota Blitar tahun 2024.

1.1.2 Keterkaitan antara Renja PD dengan Renstra Perangkat Daerah

Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Renja perangkat Daerah juga berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dalam Permendagri nomor 87 Tahun 2017, disebutkan bahwa sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran Renja Perangkat Daerah, merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi perangkat daerah. Ini artinya harus terdapat kesesuaian antara dokumen renstra dengan dokumen renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan renja Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2024 juga berpedoman pada Renstra Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2021 - 2026

1.1.3 Keterkaitan antara Renja PD dengan Renja Kementerian / Lembaga dan Renja Provinsi

Renja Kementerian/lembaga (Renja Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur) tidak terkait secara langsung dalam proses penyusunan Renja PD, seperti halnya Renstra maupun RKPD. Namun Renja Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur perlu ditelaah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana program provinsi yang dapat berpengaruh langsung terhadap terhadap Renja Bakesbangpol Kota Blitar tahun 2024.

1.1.4 Renja dan Tindak lanjutnya dalam APBD

Renja Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2024. Sedangkan RKA Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2024 merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan sebagai dokumen APBD Kota Blitar. Oleh karena itu Renja merupakan salah satu dokumen penting untuk kemudian ditindaklanjuti dalam APBD Kota Blitar Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Renja Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2024 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negarja Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6841);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
20. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Nomor 41 Tahun 2023 Seri E);
28. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7); dan
30. Peraturan Walikota Blitar No. 74 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 66 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan

Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2022 Nomor 74).

31. Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
32. Peraturan Walikota Blitar Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 71);
33. Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 nomor XX).
34. Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun …….. Nomor ……).

1.3 Maksud dan Tujuan

Disusunnya Renja Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2024 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah tahun 2024 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta disusun mengacu pada RKPD tahun 2024.

Tujuan penyusunan Renja Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2024 adalah sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS Tahun 2024 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Renja Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan.
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2023
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2023 dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar.
- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar.
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar.

BAB V Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam rangka memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada bab ini disajikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bakesbangpol Kota Blitar tahun lalu (2022) dan prakiraan capaian tahun berjalan (2023) dengan mengacu pada APBD tahun 2023. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun–tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah.

Adapun program Bakesbangpol Kota Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2021 (n-2) dan tahun 2022 (n-1) adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Program
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2023
Kota Blitar

1	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Blitar sampai dengan RKPD Kota Blitar Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8-=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
	Indikator Sasaran:									
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (82,94)		A (84,96)	85,54	100	A (84,97)	A (84,97)	100
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (88,6)		A (88,65)	88,69	100	88,7 indeks	88,7 indeks	100
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%		100%	100%	100	100 %	100 %	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 dokumen		11 dokumen	11 dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 laporan		9 laporan	9 laporan	100	20 Laporan	20 Laporan	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%		-	-		100 %	100 %	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 ASN		19 ASN	19 ASN	100	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	5 laporan		5 laporan	5 laporan	100	5 Laporan	5 Laporan	100

		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD								
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%		100%	100%	100	100 %	100 %	100
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0		-	-	-	2 paket	2 paket	100
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	21 ASN		-	-	-	19 Orang	19 Orang	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%		-	100%	100	100 %	100 %	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 komponen		5 komponen	5 komponen	100	1 Paket	1 Paket	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0		8 jenis	8 jenis	100	3 Paket	3 Paket	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	28 jenis		27 jenis	27 jenis	100	2 Paket	2 Paket	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1020 dos		1285 dos	480 dos	37,4	12 Paket	12 Paket	100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 cetakan/ 28473 lembar		8 cetakan/ 14556 lembar	8 cetakan/ 14556 lembar		1 Paket	1 Paket	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 bahan bacaan		3 bahan bacaan	3 bahan bacaan	100	24 Dokumen	24 Dokumen	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 rakor		45 rakor	44 rakor	98	40 Laporan	40 Laporan	100
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				-	-	-	-	-	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%		100%	100%	100	100 %	100 %	100
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0		-	-	-	-	-	100
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0		-	-	-	13 Unit	13 Unit	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0		-	-	-	4 Unit	4 Unit	100
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0		-	-	-	-	-	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%		-	-	-	100 %	100 %	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 rekening		3 rekening	3 rekening	100	36 Laporan	36 Laporan	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 kali		12 kali	12 kali	100	13 Laporan	13 Laporan	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%		-	-	-	100 %	100 %	100

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 unit		11 unit 3 unit	11 unit 4 unit	100 133	10 Unit	10 Unit	100
	Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0		-	-		8 Unit	8 Unit	100
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 jenis		6 jenis	6 jenis	100	69 Unit	69 Unit	100
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0		0	0	0	-	-	100
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit		3 unit	3 unit	100	2 Unit	2 Unit	100
	Pemeliharaan/Rehabitilasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 jenis		3 jenis	1 jenis	33	1 Unit	1 Unit	100
		Indikator Tujuan :								
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	84,38		83,6	84,88*	101,5	83,7	84,88*	101,4
		Indikator Sasaran:								
		Persentase kejadian SARA tertangani	100%		100%	100%	100	100%	100%	100
		Persentase konflik sosial tertangani	100%		100%	100%	100	100%	100%	100
		Persentase Ormas dan Orpol yang aktif	80%		80,1%	69,77%	87	80,2%	69,77%	86,99
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase penyelesaian konflik keagamaaan	NA		100%	100%	100	100%	100%	100
		Persentase kampung berkarakter Pancasila	NA		9,5%	9,5%	100	9,5%	9,5%	100
	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			81%	85%	105	82%	82%	100
		Jumlah pembentukan kampung berkarakter Pancasila	1 kampung		3 kampung	2 kampung	67	5 kampung	5 kampung	100
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50 orang		200 orang	200 oarang	100	100 orang	100 orang	100
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100	3 laporan	3 laporan	100
	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui	0 keluarga		-	-	-	100 keluarga	100 keluarga	100

	akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara								
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	NA		100%	100%	100	100 %	100 %	100
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pendidikan politik	NA		81%	90%	111	82 %	82 %	100
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2631 orang		200 orang	200 orang	100	500 Orang	500 Orang	100
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0		150 orang	150 orang	100	100 Orang	100 Orang	100
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 dokumen		-	-	-	11 Laporan	11 Laporan	100
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	NA		65%	68,23%	105	68 %	68 %	100
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi Masyarakat Yang aktif	NA		120 ormas	131 ormas	109	125 ormas	125 ormas	100
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas	0		100 orang	100 orang	100	150 Orang	150 Orang	100

		dan Ormas Asing di Daerah								
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan kompetensi pembinaan sosial	NA		76%	93,33	123	77 %	77 %	100
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi	NA		85%	100	118	87 %	87 %	100
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4200 orang		75 orang 1288 orang	75 orang 1267 orang	100 98	250 Orang	250 Orang	100
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3 lembaga		3 lembaga	3 lembaga	100	1 Laporan	1 Laporan	100
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi Konflik Sosial yang terselesaikan	100%		100%	100%	100	100 %	100 %	100
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik sosial yang ditindaklanjuti	100%		100%	100%	100	100 %	100 %	100
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50 orang		90 orang	90 orang	100	1810 Orang	1810 Orang	100
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 laporan		1 laporan	0	0	2 Laporan	2 Laporan	100
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	0		-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Program/kegiatan tahun 2022 **ada beberapa yang tidak memenuhi** target hal ini disebabkan kurangnya koordinasi, berikut tabel persentase realisasi anggaran:

NO	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	%
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN**	**96,86**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**92,93**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	99,35
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	89,98
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**96,92**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	97,01
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/ Semesteran	64,98
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**98,86**
	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	98,86
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**94,75**
	Penyediaan Komponen Instalasi	99,77
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95,74
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	99,68
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82,90
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	99,81
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95,20
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**97,93**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	93,18
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99,19
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**99,08**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	98,49
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99,27
	Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99,31
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	98,93
2	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**94,19**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	**94,19**
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal	90,57

	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	99,73
3	**Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya**	**96,55**
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	96,55
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah	84,07
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah	100
4	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**66,39**
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial	66,39
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah	67,80
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah	0
5	**Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	**96,24**
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	96,24
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta	88,10

	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	60,82
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	100
6	**Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**39,53**
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	39,53
	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah	39,53

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong :

a. Struktur Organisasi Bakesbangpol yang telah sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2022 sehingga menjadi lebih ramping dan kaya fungsi dengan diisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
b. Mekanisme kerja Bakesbangpol yang berorientasi kepada pencapaian kinerja dari pada pembangunan sektoral.
c. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Bakesbangpol, dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.
d. Adanya dukungan OPD terhadap upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan.
e. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga mampu memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.

2. Faktor Penghambat :

a. Belum memadainya jumlah tenaga yang menguasai bidang Bakesbangpol.
b. Belum tersedianya data – data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam proses penciptaan daerah yang kondusif komprehensif dan berkelanjutan.
c. Belum memadainya kemampuan untuk menyusun suatu kerangka pembangunan strategis yang benar – benar mencerminkan kondisi, potensi dan kebutuhan masyarakat.
d. Belum optimalnya kegiatan penelitian dan pengkajian sebagai dasar pengambilan keputusan dalam proses penciptaan yang kondusif.
e. Masih terdapatnya kebijakan pembangunan pusat yang sering kali berubah karena perkembangan politik.

Dari analisis di atas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) tahun 2022 dapat dikatakan sangat berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Hal tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel 2.2 sebagai berikut :

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BLITAR
TAHUN 2022

No.	Indikator	SPM /Standart Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase kejadian SARA tertangani			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase konflik sosial tertangani			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Ormas dan Orpol yang aktif			80,1%	80,2%	80,3%	80,4%	69,77%	80,2%	80,3%	80,4%	
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			A (84,96)	A (84,97)	A (84,98)	A (84,99)	A (85,54)	A (84,97)	A (84,98)	A (84,99)	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bakesbangpol Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya. Isu – isu strategis dimaksud antara lain :

1. Keterlambatan laporan potensi kejadian SARA dan konflik social yang diterima;
2. Tidak adanya kewajiban ormas mendaftaran keberadaannya kepada Bakesbangpol;
3. Pemberian layanan rekomendasi kepada masyarkat kurang didukung oleh SDM yang kompeten;
4. Belum optimalnya peran aktif Jejaring Panca Mandala untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju yng selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUAPPAS.

Renja Bakesbangpol berdasarkan RKPD Kota Blitar sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja PD se- Kota Blitar yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di Wilayah Bakesbangpol Kota Blitar.

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
KOTA BLITAR

Nama PD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

		RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
No	**PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF Rp.**	**PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF Rp.**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bakesbangpol							**Bakesbangpol**		**25.805.906.094,00**	
	Indikator Sasaran:							**Indikator Sasaran:**			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**A (84,98)**				**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**A (84,98)**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**79-84 baik**	**4.512.327.999**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Kota Blitar	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79-84 baik	4.288.376.097,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar**	**100**	**51.800.629**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	100 %	27.052.400,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	8.234.028	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	8.526.200,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	43.566.601	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	18.526.200,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar**	**100**	**2.846.027.829**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standart	100 %	2.920.896.449,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19	2.837.736.828	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	2.912.370.249,00	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	5	8.291.001	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	8.526.200,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar**	**100**	**140.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standart	100 %	170.575.376,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanya	2	50.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5 paket	74.319.676,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	19	90.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	96.255.700,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar**	**100**	**548.366.041**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat darah sesuai standart	100 %	420.036.194,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	30.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.369.100,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	19.503.100,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	30.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	42.710.494,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	31.513.980	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	31.800.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	45.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	22.192.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	7.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	7.800.000,00	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	354.052.061	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	272.272.000,00	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	10.389.500,0	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan**	**100**	**200.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	215.270.800,00	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0						
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13	100.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	41 Unit	84.623.700,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	100.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	130.647.100,00	
	Pengadaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0	0						
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar**	**100**	**246.133.500**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	247.844.160,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	45.433.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	44.282.160,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	200.700.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	203.562.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar**	**100**	**480.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100 %	286.700.718,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	125.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	98.578.718,00	
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	8	30.000.000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	8 Unit	6.324.000,00	

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69	50.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69 Unit	32.058.000,00	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0	0						
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	175.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	149.740.000,00	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	1	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	0	0	
			Indikator Tujuan :					**Indikator Tujuan :**			
			Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	**83,85**				**Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)**	**83,85**		
			Indikator Sasaran:					**Indikator Sasaran:**			
			Persentase kejadian SARA tertangani	**100**				**Persentase kejadian SARA tertangani**	**100**		
			Persentase konflik sosial tertangani	**100**				**Persentase konflik sosial tertangani**	**100**		
			Persentase Ormas dan Orpol yang aktif	**80,3**				**Persentase Ormas dan Orpol yang aktif**	**80,3**		
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		**Persentase penyelesaian konflik keagamaaan**	**100**	**655.171.545**	**Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan**		Persentase penyelesaian konflik keagamaan	100 %	1.370.315.200,00	
			Persentase kampung berkarakter Pancasila	**9,5**				Persentase Kampung Berkarakter Pancasila	9,5 persen		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		**Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**83**	**655.171.545**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**		Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	83 %	1.370.315.200,00	
			Jumlah pembentukan kampung berkarakter Pancasila	**2**				Jumlah Pembentukan Kampung Berkarater Pancasila	2 kampung		
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan	100	230.171.545	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan	300 Orang	888.262.800,00	

	Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Sejarah Kebangsaan			Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Sejarah Kebangsaan			
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3	375.000.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 Laporan	377.958.000,00	
	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	100	50.000.000	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	400 Keluarga	104.094.400,00	
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik		**Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat**	**100**	**784.593.679**	**Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**		Persentase Partai Politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	100 %	16.751.385.197,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,		**Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pendidikan politik**	**83**	**784.593.679**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,**		Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pendidikan politik	83 %	16.751.385.197,00	

	Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					**Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**					
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	500	139.378.042	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	500 Orang	1.770.597.000,0	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100	66.965.281	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	200 Orang	49.971.900,00	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	9	578.250.356	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	11 Laporan	14.930.816.297,00	

	Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		**Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif**	**72**	**173.250.500**	**Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	72 %	49.983.200,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		**Jumlah Organisasi Masyarakat Yang aktif**	**121**	**173.250.500**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**		Jumlah Ormas yang aktif	121 ormas	49.983.200,00	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	150	173.250.500	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200 Orang	49.983.200,00	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya		**Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan kompetensi pembinaan sosial**	**78**	**1.540.744.580**	**Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya**		Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan kompetensi pembinaan sosial	78 %	287.958.000,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		**Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi**	**90**	**1.540.744.580**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**		Persentase masyarakat yang mengikuti soisalisasi	90 %	287.958.000,00	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat	250	840.744.580	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat	300 Orang	85.000.000,00	

	Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1	700.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan	202.958.000,00	
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		**Persentase potensi Konflik Sosial yang terselesaikan**	**100**	**172.757.025**	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**		Persentase potensi konflik sosial yang terselesaikan	100 %	3.057.888.400,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		**Persentase potensi konflik sosial yang ditindaklanjuti**	**100**	**172.757.025**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**		Persentase potensi konflik sosial yang ditindaklanjuti	100 %	3.057.888.400,00	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1810	35.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1810 Orang	395.259.100,00	

	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2	100.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 Laporan	2.552.958.000,00	
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1	37.757.025	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	109.671.300,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2024
KOTA BLITAR

No	Usulan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Sub Kegiatan Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	2		3	4	5	6
1	(UNTUK HIBAH) Kurangnya dukungan terhadap lembaga yang membantu pemerintah daerah mewujudkan kerukunan antar umat beragama	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	FKUB	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 lembaga	Diakomodir
2	(UNTUK HIBAH) Kurangnya dukungan terhadap lembaga yang membantu pemerintah daerah mewujudkan pembauran kebangsaan		FPK	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 lembaga	Diakomodir
3	(UNTUK HIBAH) Belum optimalnya pencegahan dan penanggulangan narkoba di Kota Blitar	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	BNK	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 lembaga	Diakomodir
4	(UNTUK HIBAH) Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan terhadap pendidikan politik masyarakat	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	PPP	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 parpol	Diakomodir
5	(UNTUK HIBAH) Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan terhadap		PKS	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	1 parpol	Diakomodir

	pendidikan politik masyarakat	Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
6	(UNTUK HIBAH) Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan terhadap pendidikan politik masyarakat	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	GOLKAR	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 parpol	Diakomodir
7	(UNTUK HIBAH) Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan terhadap pendidikan politik masyarakat		PDIP	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 parpol	Diakomodir
8	(UNTUK HIBAH) Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan terhadap pendidikan politik masyarakat		HANURA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 parpol	Diakomodir
9	(UNTUK HIBAH) Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan terhadap pendidikan politik masyarakat		PKB	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 parpol	Diakomodir
10	(UNTUK HIBAH) Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan terhadap pendidikan politik masyarakat		GERINDRA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 parpol	Diakomodir
11	(UNTUK HIBAH) Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan terhadap pendidikan politik masyarakat		DEMOKRAT	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	1 parpol	Diakomodir

				Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
12	(UNTUK HIBAH) Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan terhadap pendidikan politik masyarakat		BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 lembaga	Diakomodir
13	(UNTUK HIBAH) Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan terhadap pendidikan politik masyarakat		KPU KOTA BLITAR	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 lembaga	Diakomodir
14	(UNTUK HIBAH) Kurangnya pembiayaan operasional lembaga, dan kegiatan yang berkaitan dengan pengamanan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	POLRESTA BLITAR	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 lembaga	Diakomodir
15	(UNTUK HIBAH) Kurangnya pembiayaan operasional lembaga, dan kegiatan yang berkaitan dengan pengamanan		KODIM 0808	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 lembaga	Diakomodir
16	(UNTUK HIBAH)		FKDM	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 lembaga	Diakomodir

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom updan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.Sesuai dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024: "Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan berkelanjutan", pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi; dan
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Berdasarkan arah kebijakan Nasional Tahun 2024, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol Kota Blitar yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri sedangkan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik
c. pelaksanaan evaluasi politik;
d. penyusunan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
e. pengkoordinasian penyelenggaraan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri berdasar peraturan perundang-undangan; dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan
f. Pengkoordinasian kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
g. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri berdasar peraturan perundang-undangan;
h. pelaksanaan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan;
i. pelaksanaan pendataan, penyusunan kebijakan dan pembinaan peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
j. pelaksanaan pendataan, analisa, pembuatan kajian, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
k. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
l. pelaksanaan analisa guna peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan faslitasi penanganan konflik sosial;
m. pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;

n. penyusunan kebijakan penanganan SARA dan konflik sosial di Kota Blitar;
o. perumusan kebijakan peningkatan keaktifan organisasi masyarakat dan organisasi politik di Kota Blitar;
p. penyusunan kebijakan indeks kapasitas daerah;
q. penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkup badan kesatuan bangsa dan politik;
r. perumusan pengukuran kepuasan pengguna layanan;
s. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kesatuan bangsa dan politik;
t. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan kesatuan bangsa dan politik secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
u. pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas Badan;
v. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
w. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Renja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Bakesbangpol Kota Blitar melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Renja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi OPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu. Sehingga ditentukan indikator Kinerja Bakesbangpol Kota Blitar berdasarkan kelompok sasaran sebagai berikut :
Tujuan : Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama

Tabel 3.2.1
Indikator Tujuan dan Formula Perhitungan
(Renstra 2021 - 2026)

INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	Target	Realisasi	Target	
		2022		2023	2024
Indeks Kerukunan Umat Beragama	Rumus Indeks	83,6	84,88*	83,7	83,85

Tabel 3.2.2
Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar
(Renstra 2021 - 2026)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target	
			2022		2023	2024
1	Meningkatnya Komunikasi dan Silaturahmi Antar Umat Beragama	Persentase Kejadian SARA Tertangani	100%	100%	100%	100%
		Persentase konflik sosial tertangani	100%	100%	100%	100%
		Persentase Ormas dan Orpol yang aktif	80,1%	69,77%	80,2%	80,3%
2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	A 84,96	A 85,54	A (84,97)	A (84,98)

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada tahun 2024 Bakesbangpol memiliki 6 program, … kegiatan, dan … sub kegiatan seprti yang terterat dalam tabel berikut:

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan
			Pembentukan Dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila Dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai

		Situasi Politik	Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
3	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah
4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah
			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
			Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
			Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD
		Pengadaan Barang Milik	Pengadaan Mebel
			Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya

		Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
			Pemeliharaan Mebel
			Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Rencana kerja (Renja) dan pendanaan tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Renstra Bakesbangpol Kota Blitar untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

4.1 Rencana Tindaklanjut LKJIP Bakesbangpol Tahun 2022 pada Renja Bakesbangpol Tahun 2024

Tabel 4.1
Rencana Tindaklanjut LKJIP Bakesbangpol Tahun 2022 pada Renja Bakesbangpol Tahun 2024

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Mengoptimalkan fungsi pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan pemberian hibah untuk memastikan pencapaian telah sesuai target yang ditetapkan serta dugunakan sebagai dasar pemberian hibah selanjutnya	Secara berkala Bakesbangpol melaksanakan pengendalian dan evaluasi laporan pertanggungjawaban dana hibah oleh lembaga	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

			Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
2	Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi e-landa sebagai media layanan pemberian rekomendasi ijin penelitian dan informasi kerawanan social dan potensi konflik, keberadaan dan keaktifan Ormas	Melaukan sosialisasi dan penerapan pemakaian aplikasi kepada masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Penyusunan IKM)
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

4.2 Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Bakesbangpol

Rumusan rencana program dan kegiatan serta pendanaan pada Bakesbangpol Kota Blitar tahun 2024 dan proyeksi tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut :

TABEL 4.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2024
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KOTA BLITAR

Nama PD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian KInerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		**Kota Blitar**		25.805.906.094,00	INSENTIF FISKAL			8.326.924.523,00
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				25.805.906.094,00	INSENTIF FISKAL			8.326.924.523,00
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIk				25.805.906.094,00	INSENTIF FISKAL			8.326.924.523,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		79-84 baik	4.288.376.097,00	INSENTIF FISKAL		79-84 baik	4.662.604.023,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		100%	27.052.400,00	INSENTIF FISKAL		100%	29.114.860,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		12 dokumen	8.526.200,00	INSENTIF FISKAL		12 dokumen	9.057.430,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		20 laporan	18.526.200,00	INSENTIF FISKAL		20 laporan	20.057.430,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		100%	2.920.896.449,00	INSENTIF FISKAL		100%	3.212.727.374,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		19 Orang/bula	2.912.370.249,00	INSENTIF FISKAL		19 Orang/bula	3.203.607.273,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD		5 laporan	8.526.200,00	INSENTIF FISKAL		5 laporan	9.120.101,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100%	170.575.376,00	INSENTIF FISKAL		100%	436.986.722,00

					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		5 paket	74.319.676,00	INSENTIF FISKAL		2 paket	70.757.500,00
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		20 Orang	96.255.700,00	INSENTIF FISKAL		19 Orang	110.000.000,00
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		100 %	420.036.194,00	INSENTIF FISKAL		100 %	436.986.722,00
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	13.369.100,00	INSENTIF FISKAL		1 Paket	17.481.845,00
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	19.503.100,00	INSENTIF FISKAL		3 Paket	18.378.864,00
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		2 Paket	42.710.494,00	INSENTIF FISKAL		2 Paket	11.691.781,00
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2 Paket	31.800.000,00	INSENTIF FISKAL		12 Paket	49.065.378,00
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	22.192.000,00	INSENTIF FISKAL		1 Paket	39.399.354,00
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		24 Dokumen	7.800.000,00	INSENTIF FISKAL		24 Dokumen	8.580.000,00
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		40 Laporan	272.272.000,00	INSENTIF FISKAL		40 Laporan	280.000.000,00
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dokumen	10.389.500,00	INSENTIF FISKAL		1 Dokumen	12.389.500,00 BADAN KESATUAN
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhann		100 %	215.270.800,00	INSENTIF FISKAL		100 %	235.000.000,0
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		41 Unit	84.623.700,00	INSENTIF FISKAL		2 Unit	100.000.000,00
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		19 Unit	130.647.100,00	INSENTIF FISKAL		1 Unit	135.000.000,00
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		100 %	247.844.160,00	INSENTIF FISKAL		100 %	271.890.307,00
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		36 Laporan	44.282.160,00	INSENTIF FISKAL		36 Laporan	50.776.850,00
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kanto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		13 Laporan	203.562.000,00	INSENTIF FISKAL		13 Laporan	221.113.457,00
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart		100 %	286.700.718,00	INSENTIF FISKAL		100 %	296.127.260,00
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		11 Unit	98.578.718,00	INSENTIF FISKAL		14 Unit	103.222.740,00
					Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		8 Unit	6.324.000,00	INSENTIF FISKAL		10 Unit	6.955.740,00
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		69 Unit	32.058.000,00	INSENTIF FISKAL		1 Unit	35.948.780,00

					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	149.740.000,00	INSENTIF FISKAL		1 Unit	150.000.000,00
					Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase penyelesaian konflik kea gamaan		100%	1.370.315.200,00			100%	1.356.820.500,00
						Persentase Kampung Berkarakter Pancasila		9,5%				14,3%	
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		83%	1.370.315.200,00	INSENTIF FISKAL		84%	1.356.820.500,00
						Jumlah Pembentukan Kampung Berkarater Pancasila		2 kampung		INSENTIF FISKAL		3 kampung	
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		300 Orang	888.262.800,00	INSENTIF FISKAL		300 Orang	938.820.500,00
					Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		3 Laporan	377.958.000,00	INSENTIF FISKAL		3 Laporan	385.000.000,00
					Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		400 Keluarga	104.094.400,00	INSENTIF FISKAL		300 Keluarga	33.000.000,00
					Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partai Politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat		100 %	16.751.385.197,00	INSENTIF FISKAL		100 %	850.000.000,00
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pendidikan politik		83%	16.751.385.197,00	INSENTIF FISKAL		84%	850.000.000,00

					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		500 Orang	1.770.597.000,00	INSENTIF FISKAL		250 orang	110.000.000,00
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		200 Orang	49.971.900,00	INSENTIF FISKAL		200 Orang	57.500.000,00
					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		11 Laporan	14.930.816.297,00	INSENTIF FISKAL		9 Laporan	682.500.000,00
					Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif		72%	49.983.200,00	INSENTIF FISKAL		75%	53.000.000,00
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Ormas yang aktif		121 ormas	49.983.200,00	INSENTIF FISKAL		122 ornas	53.000.000,00
					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		200 Orang	49.983.200,00	INSENTIF FISKAL		200 Orang	53.000.000,00
					Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan kompetensi pembinaan sosial		78 %	287.958.000,00	INSENTIF FISKAL		79%	296.500.000,00
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase masyarakat yang mengikuti soisalisasi		90 %	287.958.000,00	INSENTIF FISKAL		93%	296.500.000,00

					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		300 Orang	85.000.000,00	INSENTIF FISKAL		300 Orang	93.500.000,00
					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		1 Laporan	202.958.000,00	INSENTIF FISKAL		1 Laporan	203.000.000,00
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik sosial yang terselesaikan		100 %	3.057.888.400,00	INSENTIF FISKAL		100 %	1.108.000.000,00
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik sosial yang ditindaklanjuti		100 %	3.057.888.400,00	INSENTIF FISKAL		100 %	1.108.000.000,00
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		1810 Orang	395.259.100,00	INSENTIF FISKAL		1810 Orang	450.000.000,00
					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		3 Laporan	2.552.958.000,00	INSENTIF FISKAL		2 Laporan	503.000.000,00
					Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	109.671.300,00	INSENTIF FISKAL		1 Dokumen	155.000.000,00

Pelaksaaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota blitar, difocuskan pada:

1. Mengoptimalkan komunikasi dan silaturahmi antar umat beragama dengan Meningkatkan Koodinasi aktif dengan Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB)
2. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat untuk menciptakan kondisi yang aman dan tentram dengan melakukan mediasi/rembug kepada masyarakat dalam menangani Konflik social/masyarakat yang terjadi/muncul dan bekerjasama dengan instansi terkait
3. Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Partai Politik Dengan melaksanakan Sosialisasi aplikasi data base organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2021-2026 yang berpedoman pada RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026. Renja Tahun 2024 memuat usulan rencana kegiatan prioritas urusan pemerintahan umum. Dalam pelaksanaan Renja terdapat catatan penting yang perlu mendapat perhatian yaitu:

1) Target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang hendak dicapai agar tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai juga.
2) Ketersediaan anggaran, namun jika ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka dapat dikomunikasikan dengan pihak-pihak yang terkait agar program prioritas/unggulan tetap dapat dilaksanakan.

Agar target kinerja dan sasaran dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2024 dapat dicapai maka perlu kaidah-kaidah pelaksanaan, yaitu:

1. Dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu.
2. Fokus pada pencapaian target dan indikator kinerja pelayanan yang menjadi tugas, fungsi dan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar.
3. Tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memperhatikan dan berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada diatasnya (RPJMN, RPJMD, RKPD dan Renstra).
5. Capaian pelaksanaan kegiatan dalam Renja akan dijadikan dasar bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

Rencana tindak lanjut setelah penetapan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2024 adalah:

1. Menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) kedalam aplikasi SIRUP.
2. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan.
3. Menyusun rencana kelompok sasaran yang akan terlibat dalam kegiatan.
4. Menyusun kebutuhan administrasi kegiatan.

Blitar, 9 Mei 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Blitar

PEMERINTAH KOTA BLITAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

TOTO ROBANDIYO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196612041996031004